



NEWSLETTER

ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA DAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
(APHTN-HAN)

420 PENGAJAR HTN-HAN SUKSES IKUTI BIMTEK KERJASAMA PP APHTN-HAN DENGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Sebanyak 420 Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Se-Indonesia mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Pengujian Undang-Undang yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK), di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PusdikMKRI), Cisarua, 15/06/2021.



Bimtek dibuka langsung oleh Yangmulia Ketua Hakim MK Dr. Anwar Usaman, S.H.,M.H., dalam sambutannya Yangmulia menyampaikan dibentuknya MK sebagai tercantum dalam UUD 1945 ditunjukan untuk mengawal terjaminnya hak konstitusional warga Negara. Oleh karena Undang-Undang adalah Produk Politik yang dibentuk oleh dua lembaga kekuasaan Negara (Eksekutif dan Legislatif) untuk menghindari tirani mayoritas maka MK menjadi satu-satunya jalan bagi setiap warga Negara dalam memproteksi diri terhadap pelanggaran konstitusional akibat adanya keberlakuan Undang-Undang yang inkonstitusional, terang Yangmulia Hakim MK.



Kesempatan yang sama Sekertaris Jendral MK Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H.,M.H. menyampaikan laporan bahwa kegiatan Bimtek dilaksanakan selama 4 hari 15-18 Juni 2021, dilaksanakan secara virtual. Melalui kegiatan yang dilaksanakan di PusdikMKRI, pelaksanaan Bimtek ini MK menagajak seluruh elemen Khususnya Para Pengajar HTN/HAN kalangan akademisi memahami berbagai kemudahan yang dilakukan oleh MK atas PMK terutama sehubungan dengan kewenangan pengujian perundang-undangan sebagai upaya memberikan *access of justice* bagi sahabat strategis konstitusi, ujar Ketua PP APHTN-HAN tersebut.



Sementara, Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H. menyampaikan kegiatan Bimtek yang dilaksanakan pada kesempatan ini merupakan bentuk implementasi dari kesepakatan kerja sama yang telah dilakukan dengan MK beberapa waktu yang lalu. Disebutkan oleh Bayu, peserta pada kegiatan ini adalah para dosen dari berbagai universitas yang tersebar dari Pulau Sumatra hingga Papua. Sehingga, prinsip inklusivitas sudah terlingkupi dari kepesertaan kegiatan silaturahmi intelektual bersama MK. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ini dapat memupuk rasa cinta kepada MK sebagai lembaga peradilan konstitusional di Indonesia.

Bayu juga mengungkapkan bahwa dipilihnya tema Hukum Acara PUU sebagai materi bagi APHTN-HAN tidak lain karena perkembangan hukum acaranya yang dinilai berkembang pesat dan dinamis. Sehingga menjadi penting bagi para dosen untuk mengetahui dan memahaminya dalam berbagai kepentingan akademik dan penelitian.

"Untuk itu, besar harapan PP APHTN-HAN kepada seluruh peserta agar dapat menggunakan kesempatan belajar ini dengan baik, sungguh-sungguh, dan disiplin. Mengingat MK adalah sahabat bagi akademisi," seperti yang disampaikan oleh Sekjed MK, pungkas Bayu . (RR)

Follow Us :



APHTN-HAN OFFICIAL



aphtnhan



aphtnhan



aphtnhan



081336963004



aphtnhan



081224385101